

Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng

Hardiyanti Kadir (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Masyita Majid (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Nurlinah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: hardiyantikadir@gmail.com

Abstract

This study aims to define the model of investing their foreign investment and know its prospects in Bantaeng. Teknnik analysis used is qualitative, ie by outlining and explaining the results of research in the form of words spoken or written. Data is collected using techniques sttudi litera-ture, ob-servasi, interviews and search data online. Based on the results of this study indicate that the model of investment in capital planting Bantaeng ie direct cooperation with Joint Ven-ture (a joint venture) which manages the Industrial Zone Bantaeng. Based on the advantages and disadvantages that exist, the prospect of foreign investment is manifested by the Industrial Zone Bantaeng the labor sector is very promising because it can open up employment opportu-nities for the people of Bantaeng.

Keywords: *policy, investment, bantaeng*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model invetasi penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng. Teknnik analisis yang dipakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik sttudi kepustakaan, ob-servasi, wawancara dan penelusuran data secara online. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di Kabupaten Bantaeng yaitu penanaman modal langsung dengan kerja sama Joint Venture (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sector ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabu-paten Bantaeng.

Kata kunci: *kebijakan, penanaman modal, bantaeng*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, negara berkembang diperhadapkan pada suatu kondisi yang infe-rior baik ditinjau dari manusia maupun mate-rialnya, seperti kemiskinan, produktifitas yang rendah, sumber daya alam yang kurang terolah, sumber daya manusia yang kurang terampil dan semuanya itu merupakan

akumulasi dari sifat keterbelakangan dibandingkan dengan negara-negara maju. Inferioritas tersebut mengakibatkan sulitnya Negara berkembang membangun pereko-nomiannya, sehingga ketergantungan ter-hadap Negara-negara maju akan semakin dibutuhkan.

Indonesia merupakan salah satu nega-ra yang berkembang dan ingin mencoba un-

tuk dapat membangun negaranya sendiri. Untuk mencapai keinginan tersebut Indonesia membuka diri dengan berhubungan dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya terutama dalam ekonomi nasionalnya. Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang membangun, belum memiliki keseimbangan kemampuan Antara tuntutan beban pembangunan dengan kemampuan finansialnya.

Penanaman modal asing atau biasa disebut dengan investasi sama halnya seperti pisau bermata dua yang jika dikelola dengan baik akan membawa manfaat yang sangat besar akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan membawa dampak sebaliknya. Ada dua argumen yang saling bertentangan dalam menganalisis penanaman modal asing sehingga terkadang kehadiran penanaman modal asing sering terjadi pendapat pro dan kontra mengenai peranannya dalam pembangunan. Kabupaten Bantaeng sebagai daerah otonom berupaya untuk membangun daerahnya dengan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng. Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bantaeng. Berkaca dari beberapa kondisi diatas, dan jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan kondisi bahwa ternyata penanaman modal asing bukanlah sebuah janji muluk tanpa resiko terhadap kemandirian sebuah daerah otonom maka perlu adanya telaah yang lebih mendalam tentang penanaman modal asing di kabupaten bantaeng guna meminimalisir dampak yang tidak diharapkan dalam pencapaian tujuan bernegara serta secara langsung akan meningkatkan potensi keberhasilan pemerintah kabupaten dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui penanaman modal asing maka penulis akan mengangkat penelitian dengan judul

“Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng”.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus di tingkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan implementasi program pembangunan kesehatan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non- pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan kesehatan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati

manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya implementasi program pembangunan kesehatan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk sama-sama melaksanakan program pembangunan kesehatan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran implementasi program pembangunan kesehatan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi program pembangunan kesehatan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam upaya pencapaian implementasi program pembangunan kesehatan tersebut.

Dalam konteks implementasi pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya implementasi program pembangunan kesehatan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasi akan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Kecamatan Gantarang Keke yaitu : penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam implementasi program pembangunan kesehatan. Pemberian kreativitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat

dalam implementasi program pembangunan kesehatan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Kecamatan Gantarang Keke ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan kesehatan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya implementasi program pembangunan kesehatan yang maksimal.

Sebagai sarana partisipasi masyarakat di desa telah dibentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (LPKM). Melalui lembaga ini masyarakat diharapkan dapat membantu mempercepat atau meng-efektifkan pembangunan kesehatan di Kecamatan dan pembangunan nasional pada umumnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, selain perhatian diharapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan kesehatan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan kesehatan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka.

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke yaitu pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk kegiatan penyuluhan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, imunisasi, pengobatan penyakit diare, dan pelayanan gizi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses implementasi pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan tersebut

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Pemerintah Daerah dalam Inovasi di Kabupaten Bantaeng Dalam proses kerjasama investasi penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng ini telah melibatkan beberapa pihak yang saling bekerjasama untuk mendukung investasi ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu pihak yang bekerja sama memberikan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan investor, seperti

1. pemberian data terkait pembangunan ,
2. memfasilitasi pembebasan lahan,
3. pembebasan retribusi.

Hal ini sesuai yang tertera dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing pada pasal 18 dan pasal 26 yang berbunyi : Pasal 18 (ayat 1 dan 2) “

1. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal
2. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang :

a. Melakukan perluasan usaha; atau

b. Melakukan penanaman modal baru

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bahwa pemerintah wajib memberikan fasilitas kepada investor yang ingin menanamkan modalnya. Fasilitas dan pelayanan yang baik akan memudahkan proses penanaman modal yang dilakukan oleh investor karena hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat investor merasa terjamin oleh pemerintah penerima modal sehingga akan tercipta kepercayaan (trust) dari investor kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantaeng berupaya memberikan fasilitas dan pelayanan kepada investor yang masuk ke Kabupaten Bantaeng. sehingga hal tersebut menjadi penilaian tersendiri investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. “Kabupaten Bantaeng dari segi tenaga listrik kita minim, akan tetapi kita punya keunggulan, kalau Kabupaten Bantaeng memberikan kemudahan dan kepastian investasi. Betul-betul pemerintah menjadi mitra yang baik bagi pengusaha, komitmen ini terbaca oleh dunia bahwa ada satu daerah di Indonesia yang bernama Kabupaten Bantaeng yang sejalan dengan dunia usaha. Datanglah dari berbagai negara untuk melihat Bantaeng seperti apa, satu kesyukuran karena kita sudah siap, dari segi infrastruktur kita sudah siap, kita sudah siapkan akomodasi hotel dan rumah jabatan dipersiapkan untuk mengantisipasi tamu tamu VIV ,yang ketiga adalah kemitraan yang terbangun Antara PLN dan Pemda Bantaeng yang siap membantu pasokan listrik industry, dari segi regulasi kita berikan kemudahan , dari segi lahan pemda membantu kemudahan kepada investor untuk mendapatkan lahan, tapi satu hal pemerintah membackup kepentingan rakyat.” (wawancara Bupati Bantaeng Prof. Dr. H. Nurdin Abdullah, M.Agr) pada tanggal 21 November

Jenis-jenis penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng Untuk mendongkrak

perekonomian Kabupaten Bantaeng melalui investasi industry pengolahan, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng membentuk Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) sebagai pusat kegiatan industry pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti lahan dan lokasi yang strategis, fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, air, telepon, jalan, tempat pembuangan limbah, dan lain-lain yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng telah melakukan kerjasama dengan beberapa investor dari luar untuk mendukung pembangunan kawasan ini. Keterkaitan investasi menunjukkan bahwa untuk menuju Bantaeng Industrial Park, Pemerintah melakukan kerja sama dengan beberapa investor seperti :

1. investasi power plant untuk ketersediaan listrik (PT. Bantaeng Zigma Energy, Xinhai Technology, PT Bissapu Energy Biru, PT. Mega Power Makmur, PT Bumi Bantaeng Industri, dan Sparling Capital)
2. solar supplier untuk suplay bahan bakar PT. Bantaeng Mujur Perkasa dan PT. PAN (Petronas)
3. investasi port untuk pelabuhan sebagai sarana transportasi (PT. China Harbour Indonesia dan PT. Pelabuhan Bantaeng Samudra).

Pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng Dalam pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini, pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Bintang Selatan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam bentuk konsorsium sebagai pengelola Kawasan Industri Bantaeng. Perusahaan konsorsium ini terdiri dari empat perusahaan yang saling bekerjasama membentuk satu perusahaan baru sebagai pengelola kawasan ini. Hal ini ditegaskan oleh Direktur PT. Bintang Selatan dalam wawancara dengan peneliti yang berbunyi : Perusda ini sekarang menjadi badan pengelola kawasan dia meru-

pakan konsorsium dari empat perusahaan yang terdiri dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda. Dari empat perusahaan ini membentuk perusahaan PT Bantaeng Industri Persada (BIP) sebagai pengelola kawasan..dari konsorsium itu Perusda mendapatkan 10 % dari nilai investasi dari 113 triliun total investasi. (wawancara dengan Direktur Perusda PT. Bintang Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 pukul 11.00 wita).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini di kelola oleh PT. Bantaeng Industri Persada (BIP) yang berasal dari konsorsium empat perusahaan yaitu dari PT. Bantaeng Zigma, PT. BTN Power Malaysia, PT Ximax China dan Perusda (PT. Bintang Selatan) sebagai perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam kerjasama investasi kawasan industry ini. Selain itu, dalam hal pengawasan Kawasan Industri Bantaeng ini diawasi oleh Dewan KIBA yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Bantaeng untuk mengawasi dan mengontrol segala proses kegiatan atau kerja-kerja yang dilakukan oleh kawasan industry ini. Model Kerja sama investasi di Kabupaten Bantaeng

bahwa model kerjasama investasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah kerjasama investasi joint enterprise. Joint enterprise yang menekankan suatu kerjasama kerja sama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru, namun pada dasarnya joint enterprise merupakan turunan dari bentuk kerjasama joint venture (perusahaan patungan). Dalam ventura bersama antara sector public (pemerintah) dan operator swasta, struktur ventura bersama sering kali diiringi juga dengan kontrak tambahan (misalnya, konsensi atau perjanjian kinerja) yang memerinci harapan dari masing-masing pihak.

Kiba sebagai manifestasi penanaman modal asing dan hubungannya dengan ketenagakerjaan Di dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng, ada tiga pilar pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Salah satu pilar yang dicanangkan yaitu menjadi pusat pengembangan industri di kawasan selatan Sulawesi Selatan. Olehnya itu, di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng menempatkan Kecamatan Pajukukang sebagai daerah kawasan industri di Kabupaten Bantaeng. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Ekosobud Bappeda Kabupaten Bantaeng dalam wawacaranya dengan penulis yang berbunyi : "dalam rencana tata ruang wilayah Kecamatan Pajukukang sebagai kawasan industri Bantaeng yang dikenal dengan BIPB-bantaeng Industrial Park, berkat jaringan bupati dan pelayan yang diberikan (kemudahan perizinan), layanan kesehatan, infrastruktur dan kultur masyarakat bantaeng yang welcom menjadi daya tarik investor untuk masuk ke Bantaeng, Bantaeng bukan penghasil tambang, sebagai mata rantai perekonomian di Bantaeng dari hasil tambang dari daerah lain, maka Bantaeng akan menjadi daerah pengolah hasil tambang dari daerah lain." (wawancara dengan Kabid Ekosobud Bappeda Bantaeng pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 11.30 Wita).

Dari wawancara diatas dapat di lihat bahwa titik tolak penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng adalah kerjasama investasi industri pengolahan nikel (smelter). Namun seperti yang dapat di lihat dalam hasil wawancara bahwa bantaeng bukan merupakan produsen hasil tambang melainkan pengolah hasil tambang, dalam hal ini hasil tambang berupa nikel. Mengenai hal ini akan dibahas kemudian dalam pembahasan selanjutnya.

Industri pengolahan nikel (smelter) ini menjadi titik tolak masuknya beberapa investasi pendukung di Kabupaten Bantaeng. Sehingga untuk mengakomodir semua

investasi di Kabupaten Bantaeng, maka dibangunlah sebuah kawasan khusus industry.

Kelebihan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng

1. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Bantaeng Kehadiran Kawasan Industri Bantaeng (Kiba) sebagai manifestasi dari penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng tentu saja menjadi angin segar bagi sector ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Hal ini dimungkinkan karena di dalam Kawasan Industri Bantaeng itu sendiri terdapat investasi utama berupa investasi smelter pengolahan nikel dan beberapa investasi pendukung untuk menopang KIBA. Dari data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng menggambarkan bahwa total kesempatan kerja yang dibutuhkan dalam Kawasan Industri Bantaeng ini sebanyak 55.120 tenaga kerja yang bakalan diserap nantinya. Dari total tenaga kerja yang dibutuhkan ini bakalan menjadi sebuah solusi untuk mengentaskan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 56.492 orang dari 114.359 angkatan kerja Kabupaten Bantaeng (sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng).

2. Tumbuhnya Sektor Ekonomi Baru di Kawasan Industri Bantaeng . Kehadiran Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pajukukang akan membawa dampak yang signifikan terhadap roda perekonomian yang ada di daerah Pajukukang yang menjadi areal pembangunan kawasan industry tersebut. Kawasan Industri Bantaeng bakalan menjadi sentrum kegiatan perekonomian di Kecamatan Pajukukang karena areal kawasan tersebut membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja Kawasan Industri Bantaeng. Hal ini juga ditegaskan oleh Kabid Ekosobud Bappeda Kabupaten Bantaeng dalam kutipan wawacaranya dengan

penulis yang berbunyi : “Kawasan Industri Bantaeng ini juga akan membawa dampak positif bagi masyarakat di daerah sekitar kawasan, dalam hal ini masyarakat Pajjukukang karena nantinya pasti bakalan membuka peluang usaha bagi masyarakat seperti, warung makanan, usaha laundry, penginapan dan lain-lain (wawancara dengan Kabid Ekosobud Bappeda Kabupaten Bantaeng pada tanggal 10 Desember 2014 pukul 11.30 Wita)

Berdasarkan wawancara di atas, menegaskan bahwa Kawasan Industri Bantaeng bakalan membuka peluang usaha bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar areal Kawasan Industri Bantaeng.

3. Adanya dana alokasi terhadap APBD Investasi merupakan kunci utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu negara maka semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Sama halnya yang kasus investasi yang ada di Kabupaten Bantaeng melalui Kawasan Industri Bantaeng. Dengan adanya mega proyek berupa kawasan industri dengan total investasi sekitar 113 triliun maka tentu saja akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bantaeng. Hal ini dimungkinkan karena dari total investasi tersebut Kabupaten Bantaeng melalui Perusda berhak terhadap 10% kepemilikan saham sebagai salah satu pengelola Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Dengan kepemilikan saham tersebut, penulis berasumsi bahwa keadaan fiskal Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya hanya memiliki 600 M total APBD ini akan mendapatkan keuntungan sekitar 11,3 triliun yang nantinya akan terserap ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Bantaeng. Olehnya itu, dengan kondisi ini akan membuat kapasitas fiskal Kabupaten Bantaeng menjadi mapan sehingga Kabupaten Bantaeng

akan menjadi surplus anggaran. Kelemahan Penanaman Modal Asing di Bantaeng :

1. Tingkat pendidikan masyarakat Bantaeng tergolong rendah. Tingkat pendidikan mengambil peran penting terhadap spesialisasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam industry. Dalam kasus Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini nantinya bakalan menyerap banyak tenaga kerja yang tentu saja memiliki spesialisasi tersendiri berdasarkan kebutuhan industry. Olehnya itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Kawasan Industri Bantaeng nantinya maka tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Namun berdasarkan data yang ada, tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng ini masih dibawah rata-rata yaitu seperempat angkatan kerja Kabupaten Bantaeng. Tidak/Belum Sekolah (36,00%) kemudian Tamat SD (24,69%) dan (15,30%). Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng masih di bawah rata-rata. Dengan kondisi ini tersebut besar kemungkinan kalau spesialisasi yang memungkinkan untuk angkatan kerja yang diserap nantinya itu sebagian besar hanya sebagai buruh pabrik. Sehingga angkatan kerja Kabupaten Bantaeng akan sulit berkompetisi dengan tenaga asing yang tentunya memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan arus modernitas industrialisasi.

2. Kabupaten Bantaeng bukan hasil bahan baku tambang Industri pengolahan nikel (smelter) merupakan investasi utama yang ada di Kawasan Industri Bantaeng. Industri pengolahan nikel nantinya bakalan banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa total tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industry pengolah nikel ini (smelter) sebanyak 10.600 orang tenaga kerja. Namun satu hal yang mesti diperhatikan dalam industry pengolahan ini bahwa ketersediaan bahan baku merupakan faktor utama untuk kesinambun-

gan industry ini agar tetap beroperasi. Hal ini merupakan menjadi salah satu ancaman atau pun kelemahan nantinya, karena dalam industry pengolahan nikel ini Kabupaten Bantaeng sebagai daerah yang bakalan memusatkan pengolahan nikel ini di Kawasan Industri Bantaeng tidak memiliki bahan baku berupa nikel atau dengan kata lain bahwa Kabupaten Bantaeng bukan penghasil nikel(bahan baku). Kabupaten Bantaeng hanya akan memanfaatkan pasokan bahan baku nikel dari Sulawesi Tenggara. Hal ini diperkuat dengan adanya nota kesepahaman antara kedua Pemerintah berupa MOU. Olehnya itu, ini bakalan menjadi ancaman bagi Kawasan Industri Bantaeng itu sendiri jika sewaktuwaktu bahan baku berupa nikel yang dipasok dari Sulawesi Tenggara ini macet atau berhenti menyuplai. Maka kondisi ini akan mengancam keberlangsungan operasional Kawasan Industri Bantaeng dalam hal ini smelter yang mengangatkan kurang lebih 10.600 tenaga kerja industry. Sehingga bisa jadi ada kemungkinan jika pasokan bahan baku berhenti secara otomatis industry pengolahan nikel pun akan berhenti beroperasi dan 10.600 tenaga kerja industry ini akan terancam untuk diberhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

KESIMPULAN

Model penanaman modal asing di kabupaten Bantaeng adalah penanaman modal asing langsung dengan bentuk kerja sama investasi joint venture dimana pemerintah kabupaten mealai PT. Bintang Selatan (perusda) tergabung dalam konsorsium (joint venture) pengelola Kawasan Industri Bantaeng.

Industri pengelolaan Nikel (Smelter) merupakan investasi utama didalam kawasan industri Bantaeng kemudian menarik beberapa investasi pendukung yang pada hari ini membentuk sebuah kawasan industri Bantaeng.

Kelebihan penanaman modal asing dalam sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Bantaeng, adanya dana alokasi untuk pengembangan APBD yang dapat disalurkan untuk sektor ekonomi lainnya dan model kerjasama berupa joint venture yang memberikan andil kepada pemerintah kabupaten Bantaeng terutama yang ada hubungannya dengan perekrutan tenaga kerja local sedangkan kekurangannya yaitu tingkat pendidikan angkatan kerja Kabupaten Bantaeng tergolong rendah yang mengakibatkan penduduk Bantaeng diasumsikan lebih terserap pada posisi buruh yang memiliki penghasilan standar minimum dan Kabupateb Bantaeng bukan penghasil bahan baku tambang yang mampu menyebabkan tidak stabilnya arus produksi jika suplai sumber daya mengalami masalah.

Prospek terhadap ketenagakerjaan modal asing ini menjanjikan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta peningkatan sector mata pencaharian lain disekitar kawasan industri tanpa menurunkan produktifitas sektor ekonomi lainnya. Hal tersebut dikarenakan sektor ketanagakerjaan lainnya seperti pertanian dan perikanan akan mendapatkan keuntungan langsung dari distribusi bahan pokok ke kawasan industri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Anoraga Pandji.1994. Perusahaan Multi Nasional, Semarang : Pustaka Jaya
- Daeng, Salamuddin. 2008. Makro Ekonomi Minus (sebuah tinjauan kritis penanaman modal di Indonesia), Jakarta: Institute for Global Justice.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.2013.
- Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bantaeng.
Bantaeng

- Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.
Yogyakarta: 1999.
- Ikbar, Drs. Yanuar, M.A. 2006. Ekonomi Politik Internasional 2, Bandung : Refika Aditma
- Mardalis, Drs. 1989. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,
Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Juanda. 2012. Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik, Makassar : CV Menara Intan
- Suwanto Sukarnen. 2012. Ventura Bersama (Joint Venture), Jakarta : Salemba Empat
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,
Jakarta : Rajawali Pers

- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032

